

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014**

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian ini disusun dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2014 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan sasaran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Tasikmalaya terbentang pada letak astronomis 108° 08' 38" - 108° 24' 02" BT dan 7° 10' - 7° 26' 32" LS memiliki wilayah seluas 18.385,07 Ha (183,85 Km²), terdiri dari 10 Kecamatan dengan luas serta jumlah penduduk serta kepadatan penduduk per kecamatan masing-masing seperti pada tabel berikut :

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jml Kelurahan
1	Kawalu	42,77	87.607	2.048	10
2	Tamansari	35,99	65.303	1.814	8
3	Cibeureum	19,04	62.959	3.307	9
4	Purbaratu	12,01	39.134	3.258	6
5	Tawang	7,07	64.764	9.160	5
6	Cihideung	5,49	73.631	13.412	6
7	Mangkubumi	24,53	87.995	3.587	8
8	Indihiang	11,04	49.034	4.421	6
9	Bungursari	16,90	47.217	2.279	7
10	Cipedes	8,96	77.150	8.610	4
	Jumlah	183,85	654.794	3.562	69

Mempunyai Batas-batas administratif terdiri atas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

Berada pada daerah dengan ketinggian berkisar antara 201-503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki G.Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu sekitar 201 mdpl.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Cibeureum, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran

2. Perkembangan Indikator Makro Kota Tasikmalaya

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan tiga indikator utama yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan perhitungan, IPM Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 mencapai 75,88 poin dengan capaian indikator komposit pada Indeks Pendidikan mencapai 86,30 poin, Indeks Kesehatan mencapai 76,51 poin dan Indeks Daya Beli mencapai 64,82 poin.

No	Indikator Makro	Satuan	2013	2014
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Basis Point	75,71	75,88
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,8	70,91
	Indeks Kesehatan	Basis Point	76,33	76,51
	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,79	99,8
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,89	8,9
	Indeks Pendidikan	Basis Point	86,28	86,3
	Paritas Daya Beli (PPP=Purchasing Power	Ribu Rupiah /org/Bln	639,11	640,47

	Parity)			
	Indeks Daya Beli	Basis Point	64,29	64,89
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	651.676	654.794
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,54	0,48
4.	PDRB adh berlaku	Juta Rupiah	11.231.628,34*
5.	Inflasi	%	6,89	8,09
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,92
7.	PDRB per kapita berlaku	Rp	6.687.108,43*
8.	Indeks Gini	Basis Point	0,286
9.	Angka Kemiskinan	Persen	17,19*
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,08	5,38
11.	Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,22	60,67
12.	Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Persen	95,92	94,62

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 104,10% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:

- a. PAD ditargetkan sebesar Rp. 230.647.636.948,00 direalisasikan sebesar Rp. 242.991.685.932,00 atau 105,35 % dari target yang ditetapkan dengan rincian Penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.65.091.390.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 73.187.386.571,00 atau 112,44%. Penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 10.098.810.948,00 direalisasikan sebesar Rp. 10.692.435.120,00 atau 105,88%. Penerimaan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 4.686.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 4.937.249.923,00 atau 105,36 % dan Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 150.771.436.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 154.174.614.318,00 atau 102,26 %;
- b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 823.835.597.404,00 direalisasikan sebesar Rp. 842.857.954.631,00 atau 102,31 % dari target yang ditetapkan dengan rincian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 48.929.344.404,00 direalisasikan sebesar Rp. 67.951.701.631,00 atau 138,88 %, Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp. 732.508.313.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 732.508.313.000,00 atau 100,00 % dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan Rp. 42.397.940.000,00 direalisasikan sebesar . 42.397.940.000,00 atau 100,00%;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 496.604.949.410,00 direalisasikan sebesar Rp. 499.356.200.881,00 atau 100,55% dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp. 63.845.425.160,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 64.743.278.731,00 atau 101,4%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 223.454.243.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 223.454.243.000,00 atau 100,00% dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 209.305.281.250,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 211.158.679.150,00 atau 100,89 %.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 104,10% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja belanja berdasarkan jenis belanja :

- a. Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 916.893.728.833,00 direalisasikan sebesar Rp. 804.203.383.074 atau 87,71 % terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 843.596.082.354,00 direalisasikan sebesar Rp. 745.886.526.578,00 atau 88,42 %;
 - 2) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 42.752.130.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 42.145.880.000,00 atau 98,58 %;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 13.026.246.741,00 direalisasikan sebesar Rp. 8.383.194.101 atau 64,36 %;
 - 4) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 896.794.600,00 direalisasikan sebesar Rp. 896.792.874,00 atau 100 %;
 - 5) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 16.622.475.138,00 direalisasikan sebesar Rp. 6.890.989.521,00 atau 41,46 %.
- b. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 734.259.685.896,00 direalisasikan sebesar Rp. 642.916.565.592, 00 atau 87,56 % terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 119.109.992.600,00 direalisasikan sebesar Rp. 105.905.452.092,00 atau 88,91 %;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 282.958.324.782,00 direalisasikan sebesar Rp. 267.354.693.623,00 atau 92,37 %;
 - 3) Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 332.191.368.605,00 direalisasikan sebesar Rp. 275.656.419.877,00 atau 82,98 %.

Realisasi belanja langsung dan tidak langsung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tasikmalaya sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2017 yaitu “ **Berdasarkan Iman dan Taqwa Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani** ”.

III. PELAKSANAAN URUSAN DESENTRALISASI

Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Pada tahun 2014, rencana belanja langsung urusan wajib sebesar Rp.559.451.201.398,00; direalisasikan sebesar Rp. 495.259.322.002 atau 88,53%. Belanja tersebut digunakan untuk mendanai 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana uraian dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan.

Belanja langsung urusan pendidikan sebesar Rp.54.545.479.480,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.42.233.004.773,00 atau 77,43%. Antara lain berupa Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 5, SMAN 10, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3 dan SMKN 4, penataan halaman serta pembangunan benteng pagar sekolah, pembangunan/rehabilitasi sarana olahraga dan sanitasi sekolah, rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, pematangan lahan SMPN 5 dll.

capaian makro urusan pendidikan yaitu indeks pendidikan tercapai 86,3 poin, Angka Melek Huruf 99,8 %, Rata-rata Lama sekolah 8,9 Tahun, Angka Partisipasi Kasar SD/MI 114,07 %, APK SMP/MTs 103,12%, APK SMA/SMK/MA 95,88 %

2. Urusan Kesehatan.

Anggaran urusan wajib kesehatan sebesar Rp.184.323.173.732,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.150.505.708.149,00 atau 81,65%. Antara lain berupa Rehabilitasi Puskesmas Pembantu, Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya, Rehabilitasi Puskesmas mampu PONEB, Rehabilitasi RB Dewi Sartika, Pembangunan/Rehabilitasi POLINDES, Pengembangan Gedung Unit Transfusi Darah Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Dr. Soekardjo, Rehabilitasi Ruang ICU/HCU

3. Urusan Pekerjaan Umum.

Anggaran urusan wajib pekerjaan umum sebesar Rp. 116.897.028.990,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.113.341.996.749,00 atau 96,96 %.

Antara lain berupa Pembangunan Jalan Sepanjang 1.200m, Pemeliharaan jalan sepanjang 60.904m, peningkatan jalan sepanjang 55.814m, pembangunan/pemeliharaan drainase/kirmir sepanjang 4.950m. rehabilitasi infrastruktur irigasi, penanggulangan banjir berupa normalisasi saluran air.

4. Urusan Perumahan.

Anggaran urusan wajib perumahan sebesar Rp.34.340.800.00,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.33.861.868.467,00 atau 98,61%.

5. Urusan Penataan Ruang.

Anggaran urusan wajib penataan ruang sebesar Rp.3.145.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.811.126.615,00 atau 89,38%. Capaian kinerja urusan perumahan dan penataan ruang antara lain pemeliharaan jalan/peningkatan jalan lingkungan sepanjang 57.000m, pemeliharaan drainase gorong-gorong sepanjang 12.770m, pembangunan MCK 41 unit, pengelolaan sarana umum yang sudah menjadi aset pemkot sebanyak 5 perumahan, pengelolaan sampah mandiri 3R di 12 RW/UPS, cakupan layanan air minum 38% dan cakupan layanan persampahan 33,11%

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Anggaran urusan wajib Perencanaan Pembangunan Rp. 4.693.263.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.4.456.594.480,00 atau 94,96%. Antara lain berupa pengembangan data/informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan, pelaksanaan musrenbang, perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya.

7. Urusan Perhubungan.

Anggaran urusan wajib perhubungan sebesar Rp.12.461.558.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.12.262.290.375,00 atau 98,40%. Antara lain berupa pemeliharaan sarana alat uji kendaraan, Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas traffict light dan warning light, ATCS, pemeliharaan terminal, halte, shelter dan taman terminal, pembangunan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum, pembangunan pos jaga da atur (Pos Gatur) Lalu lintas.

8. Urusan Lingkungan Hidup.

Anggaran urusan wajib lingkungan hidup sebesar Rp. 14.112.903.902,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.13.469.316.113,00 atau 95,44%.

9. Urusan Pertanahan

Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Setda dengan jumlah anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.594.440.300,00 atau 99,07%. Berupa penegasan batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dengan penentuan koordinat GPS dan pemasangan pilar titik koordinat.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.110.152.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.963.477.204,00 atau 93,05%. Berupa perekaman dan penerbitan e-KTP.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Usuran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan demikian total anggaran untuk melaksanakan urusan wajib ini adalah Rp.352.716.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.314.179.950,00 atau 89,07%.

12. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

Program untuk memenuhi urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini dengan anggaran sebesar Rp. 2.904.354.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.629.777.939,00 atau 90,55%

13. Urusan Sosial.

Anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp.5.582.424.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.296.315.429,00 atau 94,87%.

Selain program yang telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah tersebut, terdapat juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS yang merupakan program kebijakan *Top Down* yakni sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah yakni **Program Keluarga Harapan (PKH)**. Penyaluran PKH Kota Tasikmalaya tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Alokasi dan Realisasi PKH Kota Tasikmalaya
Tahun 2014

No	Tahap	Alokasi		Realisasi	
		Jmlh RTS	Anggaran	Jmlh RTS	Anggaran
1	I	21.303	7.311.500.00000	21.278	7.303.625.000
2	II	21.190	12.199.381.500	21.190	12.199.381.500
3	III	21.124	7.146.312.500	21.124	7.146.312.500
4	IV	20.665	6.897.700.000	20.665	6.897.700.000

14. Urusan Ketenagakerjaan.

Anggaran urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp.595.724.830,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.529.983.500,00 atau 88,96%. Antara lain pelaksanaan job fair

15. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Program untuk memenuhi urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah ini sebanyak 3 (tiga) Program dengan total anggaran sebesar Rp.1.412.646.075,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.329.350.865,00 atau 94,10%

16. Urusan Penanaman Modal.

Usuran wajib penanaman modal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui satu buah program yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan besar anggaran Rp.394.570.589,00 realisasi Rp.331.646.675,00 atau 84,05%. Program ini dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan BPPMPT.

17. Urusan Kebudayaan.

Anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp.1.287.500.000,00 realisasi 1.207.879.375,00 atau 93,82%.

18. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga.

Anggaran urusan wajib kepemudaan dan olah raga sebesar Rp.9.003.718.000,00 dengan realisasi Rp.5.783.130.945,00 atau 64,23%. antara lain berupa penataan emplasemen GOR Sukapura, GOR Susi Susanti, dan GGM, pemeliharaan Gelanggang Olahraga, pematangan lahan kompleks Dadaha.

19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp.5.378.707.000,00 dengan realisasi Rp.5.084.424.132,00 atau 94,53%.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian.

Anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp.97.055.123.000,00 dengan realisasi Rp.89.310.894.539 atau 92,02%.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Usuran wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan besar anggaran Rp.265.000.000,00 realisasinya Rp.257.193.170,00 atau 97,05%.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Usuran wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan besar anggaran Rp.755.998.000,00 realisasinya Rp.675.223.090,00 atau 89,32%. Antara lain berupa Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan; serta penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan (RPKPP)

23. Urusan Statistik

Usuran wajib Statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah dengan besar anggaran Rp.338.000.000,00 realisasinya Rp.291.087.000,00 atau 86,12%.

24. Urusan Kearsipan.

Usuran wajib Kearsipan dianggarkan sebesar Rp.1.197.943.000,00 dengan realisasi Rp.1.104.074.405,00 atau 92,16%.

25. Urusan Komunikasi Dan Informatika.

Usuran wajib komunikasi dan informatika dianggarkan sebesar Rp. 4.796.152.000,00 dengan realisasi Rp.4.728.979.483,00 atau 98,60%.

26. Urusan Perpustakaan

Urusan wajib Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp.901.265.000,00 dan realisasi sebesar Rp.889.658.280,00 atau 98,71%

Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Pada tahun 2014, rencana belanja langsung urusan pilihan sebesar Rp.32.513.381.874,00 direalisasikan sebesar Rp. 29.570.466.242,00 atau 90,95%. Belanja tersebut digunakan untuk membiayai 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, selengkapnya diuraikan dibawah ini.

1. Urusan Pertanian.
Berdasarkan rekapitulasi, dari rencana belanja langsung urusan pertanian sebesar Rp.9.429.327.800,00 realisasinya Rp.9.116.334.355,00 atau 96,68%. Antara lain berupa pembangunan jalan usaha tani dan jasa produksi, pengembangan irigasi air permukaan.
2. Urusan Kehutanan.
Realisasi anggaran urusan pilihan kehutanan adalah Rp.286.893.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.280.941.100,00 atau 97,93 %.
3. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Realisasi anggaran urusan pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah Rp.7.628.218.350,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.332.500.000,00 atau 81,74 %.
4. Urusan Pariwisata.
Anggaran urusan pilihan pariwisata sebesar Rp.657.880.000,00 dengan realisasi Rp.646.744.390,00 atau 98,31 %.
5. Urusan Kelautan Dan Perikanan.
Anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan sebesar Rp.3.333.803.899,00 dengan realisasi Rp.3.221.675.625,00 atau 96,64%. Antara lain berupa pembangunan kolam percontohan, pembangunan dan perbaikan sarana depo pasar ikan, dan peningkatan jaringan air.
6. Urusan Perdagangan.
Anggaran urusan pilihan Perdagangan sebesar Rp.1.021.500.000,00 dengan realisasi Rp.928.961.783,00 atau 90,94%.
7. Urusan Industri.
Urusan pilihan industri dilaksanakan melalui dua program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp.8.066.470.000,00 realisasi Rp.7.405.117.830,00 atau 91,80%
8. Urusan Ketransmigrasian.
Urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans melalui program Transmigrasi Regional dengan besar anggaran Rp.119.905.000,00 realisasinya Rp.115.658.009,00 atau 96,46%.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2014

MISI-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat

TUJUAN	SASARAN					
	Uraian Sasaran		Indikator Sasaran		Target Capaian Kinerja	
					2014	
1	2		3		4	5
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel.	1.	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.	1.	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot)	0,07	0.02
			2.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek (orang)	723	240
	2.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.	1.	Jumlah Unit Kerja yang menerapkan SOP (Unit)	102	43
			2.	Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku (%)	100	100
			3.	Nilai efisiensi organisasi perangkat daerah (%)	-	-
			4.	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	36.36	100
	3.	Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan	1,	Persentase tanah dan bangunan gedung SKPD milik sendiri (%)	85	92
	4.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1.	Peningkatan Pendapatan Daerah (Triliun Rupiah)	1.180	1.585

TUJUAN		SASARAN					
		Uraian Sasaran		Indikator Sasaran		Target Capaian Kinerja	Realisasi
						2014	2014
1	2	3	4	5			
	5. Meningkatnya pelayanan publik	2.	Opini laporan keuangan pemerintah daerah		WTP	
		1.	Jumlah pelayanan yang bersertifikat ISO		5	5	
		2.	Indek Kepuasan Masyarakat		75	75,45	
		3.	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah)		17	17	
		4.	Rasio penduduk ber-KTP (%)		86	98,42	
		5.	Kepemilikan akte kelahiran (per 1000)		686	316	
		6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada	Ada	
		6. Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat.	1.	Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk (buah)		10	9
			2.	Jumlah Peraturan Walikota yang dibentuk (buah)		25	56
			3.	Penegakan Peraturan Daerah (%)		94	95
			4.	Partisipasi pada Pemilu (%)		80	86
		7. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat.	1.	Partisipasi masyarakat dalam musrenbang (%)		86	86
			2.	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan (buah)		4	5
			3.	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja SKPD (%)		60	50,87
			4.	Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya / Tidak)		Ya	Ya
	2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religious	1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk)		4,1	4.1
			2.	Jumlah Linmas per Jumlah (per 10.000 penduduk)		40	40
			3.	Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)		5	5
			4.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3		85	85
		2. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1.	Konflik antar pemeluk agama (kasus)		1	3
2.			Konflik Masyarakat		1	1	
3.			Penanganan konflik masyarakat (kasus)		1	1	

MISI-2: Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan yang Berwawasan Lingkungan

TUJUAN		SASARAN					
		Uraian Sasaran		Indikator Sasaran		Target Capaian Kinerja	Realisasi
						2014	2014
1	2	3	4	5			
1. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.	1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (poin)		0,68	0,95	
		2.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air/ 1,5 meter (%)		7,3	6.47	
	2. Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku.	1.	Rasio Jaringan Irigasi (poin)		0,012	0,020	
	3. Meningkatnya sarana prasarana	1.	Rasio ijin trayek (per 10.000)		0,00216	0,00291	

TUJUAN		SASARAN					
		Uraian Sasaran		Indikator Sasaran		Target Capaian Kinerja	Realisasi
						2014	2014
1	2	3	4	5			
		perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	2.	Jumlah terminal angkutan darat/bis (unit)	5	5	
			3.	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	0,062	0.053	
			4.	Web site pemerintah daerah/SKPD	Ada	Ada	
2.	Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah.	1.	Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan.	1.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	32,56	62,02
				2.	Persentase rumah tangga ber-Sanitasi (%)	70,97	77,06
				3.	Persentase penanganan sampah (%)	48	33,11
		2.	Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang.	1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (poin)	24,85	16,32
				2.	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	67,51	67,32
		3.	Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energy	1.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	80
				2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	99,71	120,86
				3.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	32,56	62,02
				4.	Persentase Luas permukiman yang tertata (%)	67,51	67,32
				5.	Pemantauan pencemaran status mutu air (%)	50	100
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan/ekonomi kreatif dan potensi lokal.	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,95	5,92
				2.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	7.103* dlm perhitungan
				3.	Laju Inflasi Kota (%)	4,5	8,09
				4.	Indek Daya Beli (poin)	65,71	64,82
				5.	Indek Gini (poin)	0,335
		2.	Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya.	1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	90,90	95,08
				2.	Persentase koperasi aktif (%)	75,49	72,00
		3.	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.	1.	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (buah)	2	2
				2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyar Rupiah)	230	225,514

MISI-3: Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal

TUJUAN		SASARAN					
		Uraian Sasaran		Indikator Sasaran		Target Capaian Kinerja	Realisasi
						2014	2014
1	2	3	4	5			

TUJUAN	SASARAN				
	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja	Realisasi	
			2014	2014	
1	2	3	4	5	
1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan pendidikan	1. Angka melek huruf (%)	99,70	99,80	
		2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,59	8,9	
		3. Indeks Pendidikan (poin)	87,78	86,30	
		4. Angka kelulusan per jenjang pendidikan :			
		SD / MI (%)	100	100	
		SMP / MTs (%)	100	100	
		SMA / MA / SMK (%)	99,98	100	
		5. Persentase pendidikan yang ditamatkan :			
		SD / MI (%)	49,13	34,74	
		SMP / MTs (%)	19,05	15,18	
		SMA / MA / SMK (%)	20,85	20,09	
		6. Angka Partisipasi Kasar :			
		SD / MI (%)	113,24	114,07	
		SMP / MTs (%)	102,46	103,12	
	SMA / MA / SMK (%)	95,31	95,88		
	7. Angka Partisipasi Murni :				
	SD / MI (%)	99,22	99,47		
	SMP / MTs (%)	93,39	94,23		
	SMA / MA / SMK (%)	74,77	75,48		
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Bayi Register (per 1000)	10,19	10,95
2. Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)			70,63	70,91	
3. Indek Kesehatan (poin)			76,05	76,51	
4. Angka Kematian Ibu			142,2	158	
5. Persentase Balita Gizi Buruk (%)			0,36	0,43	
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.	1. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1. Angka Kemiskinan (%)	16,84* dlm perhitungan	
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,09	5,38	
		3. Rasio Penduduk yang bekerja (poin)	90,91	94,62	
		4. Tingkat Partisipasi Angkat kerja (%)	65,15	60,67	
	2. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	5,1	27,08
	3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Total Fertility Rate (TFR)	2,52	2,31
	4. Menjamin Perlindungan perempuan dan anak	1. Menjamin Perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus)	19	12
	5. Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan.	1. Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan.	1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,02	45,45
			2. Jumlah organisasi kepemudaan (buah)	72	72
	6. Pelestarian seni budaya dan olahraga	1. Pelestarian seni budaya dan olahraga	1. Jumlah grup kesenian (buah)	177	177
			2. Jumlah gedung kesenian (buah)	1	1
			3. Jumlah klub olahraga (buah)	220	220

TUJUAN	SASARAN			
	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja	Realisasi
			2014	2014
1	2	3	4	5
		4. Jumlah gedung olahraga (buah)	54	54

Pada Tahun 2013 berbagai prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih Kota Tasikmalaya, diantaranya:

NO	JENIS/ NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	BIDANG PENGHARGAAN
1	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas untuk Kota Besar	Menteri Perhubungan	Lalu Lintas
2	Kota Peduli HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Hukum dan HAM
3	Peringkat II Tingkat Nasional Lomba Kewirausahaan SMPLB/Inklusif Siswa ABK Berkebutuhan khusus	Menteri Pendidikan Nasional	Pendidikan
4	Peringkat II Tingkat Nasional Pameran SMP Terbuka Keterampilan a.n.SMP Terbuka 11	Menteri Pendidikan Nasional	Pendidikan
5	Peringkat II Tingkat Nasional Lomba Cerdas Terampil (LCT) Paket B a.n. PKBM Danis Jaya	Menteri Pendidikan Nasional	Pendidikan
6	Peringkat II Tingkat Nasional lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Siswa ABK Berkebutuhan Khusus a.n.SDN Tanjung 2	Menteri Pendidikan Nasional	Pendidikan
7	Peringkat III Tingkat Nasional Lomba Kecakapan Karya Keterampilan (LK3) Paket B a.n. PKBM Danis Jaya	Menteri Pendidikan Nasional	Pendidikan
8	Juara III Tk.Nasional lomba Inovasi Pengolahan Hasil Perikanan	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Perikanan
9	Penghargaan Medali Tokoh Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional	Pelayanan Pemerintahan
10	Peringkat I Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Jenjang Sekolah Dasar a.n. SD Al-Mukrom	Gubernur Jawa Barat	Pendidikan
11	Peingkat I Tingkat Provinsi Jawa Barat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (SD) a.n. SDN Sukasari 4	Gubernur Jawa Barat	Pendidikan
12	Peringkat I Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Perpustakaan a.n. SDN Galungggung	Gubernur Jawa Barat	Pendidikan
13	Penghargaan Terbaik Penyaluran Raskin	Gubernur Jawa Barat	Ketahanan Pangan
14	Juara II P2WKSS	Gubernur Jawa Barat	Sosial Budaya
15	Juara II Kader Posyandu	Gubernur Jawa Barat	Kesehatan
16	Juara II Sekolah Sehat Tingkat Provinsi a/n TK BPK Penabur	Gubernur Jawa Barat	Kesehatan
17	Peringkat III Kota dengan Potensi Daerah Non Industri Manufaktur, Lomba Jaminan Sosial Award Tingkat Provinsi Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	Ketenagakerjaan
18	Juara II Tk.Provinsi Jawa Barat kontes Ternak Kambing PE Kategori raja pejantan	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat	Peternakan
19	Peringkat III Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Komunikasi dan Informasi
20	Juara III Tk. Provinsi jawa Barat kontes Ternak kambing PE kategori Ratu Bibit	Dinas peternakan Provinsi Jawa Barat	peternakan
21	Peringkat II kategori Penyediaan Informasi Public Terlengkap Tingkat Provinsi jawa Barat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Komunikasi dan Informasi
22	Peringkat IV kategori Pembentukan pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Terlengkap Tingkat Provinsi Jawa Barat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Komunikasi dan Informasi
23	Peringkat V Kategori Pengumuman Informasi Publik Terlengkap Tingkat Provinsi Jawa Barat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Komunikasi dan Informasi

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.17.953.430.000,00; melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 16.869.000.000,00, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 520.520.000,00, dan Kemeterian Kelautan Perikanan

sebesar Rp. 563.910.000,00. Alokasi anggaran tugas pembantuan tersebut mencakup 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan.

V. TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

1. Kerjasama Daerah

Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 melaksanakan beberapa kerjasama daerah baik dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerjasama Pendirian dan penyelenggaraan Unsil dengan Kemendikbud
- 2) Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi di Kota Tasikmalaya dengan Badan Standarisasi Nasional
- 3) Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
- 4) Kerjasama penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan /Tata usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
- 5) Kerjasama Peningkatan Pendidikan Kompetensi Calon Guru, Praktek Pengalaman Lapangan, Pelatihan / Bimbingan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Dinas Pendidikan dengan STAI
- 6) Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum antara Dispenda dengan PLN Cabang Tasikmalaya;
- 7) Kerjasama Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jamkesda dengan RSHS, RS Mata Cicendo Bandung, RS Jasa Kartini, RS Hj. Siti Muniroh, RS Prasetya Bunda dan RS Permata Bunda.

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam rangka sinergitas dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan instansi vertikal yang ada di Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan koordinasi diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Tasikmalaya yang mengikutsertakan seluruh stakeholders termasuk instansi vertikal yang ada di Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 2) Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama BUMN, Forum CSR/TJSLP, instansi vertikal menangani kemiskinan, yang koordinasikan oleh Tim TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Tasikmalaya.
- 3) Rapat koordinasi secara rutin yang melibatkan seluruh instansi vertikal yang ada di Kota Tasikmalaya seperti dengan Kantor BPN, BPS, Kantor Kementerian Agama, Bank Indonesia, Bulog, Kantor Pajak Pratama, BPKP, dll.;
- 4) Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) merupakan forum untuk membahas berbagai isu-isu strategis dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang ada sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Selain itu rapat koordinasi tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas baik bidang politik, hukum, budaya, keamanan dan ketertiban umum yang berskala nasional, regional maupun lokal;
- 5) Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melibatkan BPS, Bank Indonesia, Sub Divisi Regional Bulog, Pertamina dan PT. PLN.
- 6) Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan fasilitasi pencegahan tindak pidana korupsi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya

3. Pembinaan Batas Wilayah

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Administrasi Antar Kelurahan tahun 2014 baru pada tahap pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Penelitian dokumen batas,
- 2) Pembuatan Peta kerja, dengan skala 1 : 50.000
Peta Batas Kelurahan, Peta Batas Kecamatan dan Peta batas Kota Tasikmalaya
- 3) Pelacakan peta kerja/penentuan garis batas sementara, dan pelacakan lapangan,
- 4) Pemasangan Pilar Batas, berupa pembangunan 7 pilar batas di kel. Sukamaju kidul, Kel.Sukamaju Kaler dan Kel.Sirmagalih dari rencana 490 pilar batas yang dibangun.
- 5) Pengukuran dan penentuan Posisi Pilar / Tugu
- 6) Pembuatan Sketsa Lokasi Tugu
- 7) Pemetaan, berupa Peta garis batas merupakan peta situasi sepanjang garis batas daerah yang memuat gambar koridor selebar 100m ke kiri dan 100m ke kanan dari garis batas daerah dengan skala 1 : 1000.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sebagai langkah tanggap darurat bagi korban bencana alam, pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan bantuan tanggap darurat kepada 93 Kepala Keluarga sebagai implementasi dari kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Alam.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan :

1. Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
2. Sosialisasi Mitigasi Bencana;
3. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan;
4. Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana;
Fasilitasi Tim Penanggulangan Bencana

VI. PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2014 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat sebagai realisasi tahunan dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.

Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : www.tasikmalayakota.go.id . Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat menyampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Jalan Letnan Harun Nomor 1 Tasikmalaya 46134 Telepon (0265) 322865 Fax (0265) 330805.

Demikian ILPPD ini kami sampaikan, semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin.

Tasikmalaya, April 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUDI BUDIMAN